



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Adib Solihin
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 459325

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.095.650.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 918.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 489.600.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 688.050.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 977.231.000

1. MOTOR, Honda Scoopy / Solo Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.860.000
2. MOTOR, Honda Vario / Solo Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.880.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER FORTUNER/ JEEP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 408.291.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP 4X2 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 556.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 95.358.750

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.641.475

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.208.881.225



III. HUTANG

Rp. 170.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.038.881.225

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.